



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SORONG SELATAN**

**NOMOR 540 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 mengatur Jumlah Persyaratan perolehan kursi

- dan suara sah untuk setiap provinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 396 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 377 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Jumlah Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum paling sedikit 20% (dua puluh persen) dikali 20 (dua puluh) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan hasil Pemilu tahun 2024 atau sama dengan  $20\% \times 20 = 4$  (empat) kursi.
- KEDUA : Jumlah Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dikali akumulasi jumlah suara sah hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2024 sebesar 34.196 (tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam) Suara Sah atau sama dengan  $25\% \times 34.196 = 8.549$  (delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan) suara sah.
- KETIGA : Jumlah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana Diktum KEDUA hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan hasil pemilihan umum tahun 2024.
- KEEMPAT : Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah yang telah ditentukan pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagai ketentuan mengikat dalam tahapan pencalonan meliputi pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon serta penetapan pasangan calon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan  
pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,

Ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

